



Proyek Rp 5 Miliar Janggal

■ PDAM Tunggu Audit BPK

SINGKAWANG, TRIBUN - Humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Poteng Singkawang, M Deni Isnaeni, menegaskan pihaknya tak akan menerima proyek air bersih yang dilaksanakan Pemprov di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2, Tirtasari. PDAM baru akan menerima jika proyek tersebut selesai sesuai perencanaan yang dibuat.

Deni mengungkapkan, perbaikan IPA dan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut dilaksanakan Pemprov sejak 2012 lalu. Sampai saat ini, proyek tersebut memang belum diselesaikan ke PDAM Singkawang sebagai pengguna.

Sebelum serah terima dilakukan, pihaknya menegaskan tak akan menerima. Karena terkait dengan masih adanya beberapa item krusial belum yang dipenuhi sehingga belum sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditentukan.

"Saluran pembuangan ke sungai, bak kimia 500 liter untuk bahan tawas, kaporit, itu sampai sekarang tidak ada. Juga beberapa hal lain yang masuk perencanaan, tapi barangnya tidak ada," ujarnya ketika ditemui di kediamannya, Minggu (7/7).

Yang terpenting menurutnya, adalah uji coba selama 48 jam nonstop yang hingga kini belum dilakukan. Sebab, uji coba ini yang menentukan apakah proyek tersebut berhasil atau tidak. Terlebih besaran anggaran yang menurut informasi mencapai Rp 5 miliar tersebut hingga kini dinilai belum menuai hasil. Bahkan di beberapa titik seperti wilayah Eria, pemasangan pipa terkesan asal-asalan.

"Proyek Eria saat dicoba juga tak mengalir. Kami tak akan menerima sebelum per-

Saluran pembuangan ke sungai, bak kimia 500 liter untuk bahan tawas, kaporit, itu sampai sekarang tidak ada. Juga beberapa hal lain yang masuk perencanaan, tapi barangnya tidak ada."

M DENI ISNAENI
Humas PDAM Singkawang

soalan ini diselesaikan," tegasnya.

Deni menegaskan, pekerjaan yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit tersebut jelas harus dipertanggungjawabkan. Bukan oleh PDAM Gunung Poteng, karena mereka tak pernah dilibatkan dalam proses pelaksanaan. "Ini memang menghambat kita untuk pelayanan ke masyarakat. Jelas kita tak mau tanggungjawab atas pekerjaan orang lain," ujarnya.

PDAM menurutnya, lebih memilih hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika memang ditemukan pelanggaran, maka pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke aparat

penegak hukum. "Kalau ada pelanggaran lalu kita diamkan, sama saja dengan kita membiarkan kejahatan di depan mata. Makanya kita tunggu uudit dulu," ujarnya.

Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, Jakius Sinyor, saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan belum bisa menjelaskan persoalan tersebut. Berhubung ada pergantian kepemimpinan pada Satuan Kerja (Satker) yang menangani proyek tersebut. Hingga harus dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.

"Saya tanya dulu. Soalnya sekarang Kepala Satker sudah berganti," ujarnya singkat. (dum)